

BAB III

ANALISA PENGUATAN KELEMBAGAAN TKPK (TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN) DALAM PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2016

Penguatan kelembagaan merupakan sebuah upaya dari sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi sistem maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Teori penguatan kelembagaan terdiri dari sumber daya manusia, sistem dan prosedur. Teori ini akan menganalisa penguatan kelembagaan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Maka dari bab ini menjelaskan mengenai analisis penguatan kelembagaan yang dilihat dari aspek sumber daya manusia, sistem dan prosedur. Indikator penguatan sumber daya manusia dapat dilihat dari pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada pegawai. Kemudian terkait dengan penguatan prosedur dilihat dari perbaikan yang ada dalam internal organisasi dan bagaimana mereka melakukan prosedur dalam melakukan pekerjaan. Yang terakhir yaitu sistem yakni berkaitan dengan visi misi organisasi dan rencana strategis.

3.1 Sumber Daya Manusia

Penguatan kelembagaan memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai fungsi sebagai perencana dalam penguatan kelembagaan. Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting di dalam sebuah organisasi.

Dengan cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia maka tujuan sebuah organisasi akan tercapai.

3.1.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kompetensi sangat penting bagi sebuah organisasi. Karena kualitas sumber daya manusia sangat menentukan sebuah organisasi. Oleh karena itu TKPK Kabupaten Bantul dalam penguatan kelembagaan perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, baik itu melakukan workshop maupun pelatihan mengenai peningkatan kinerja TKPK hingga level dusun.

Seperti yang diutarakan oleh Ibu Eni (Kasubbid Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Bantul)

“ kami telah memberikan pelatihan dan workshop bagi internal TKPK maupun TPK (Tim Pengentasan Kemiskinan) Desa, misalnya pelatihan mengenai aplikasi SIMNANGKIS (Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan) dimana dalam pelatihan tersebut kita ajari mengenai olah data”. (Hasil wawancara tanggal 20 November 2017)

Pelatihan aplikasi SIMNANGKIS ini telah diberikan kepada seluruh Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kecamatan dan Desa. Pelatihan ini di mulai sejak tahun 2015 dan nantinya setiap TPK Kecamatan dan Desa akan ada perwakilan satu operator untuk menjalankan aplikasi ini. Dalam melakukan pelatihan dilakukan di setiap kantor kecamatan dengan memberikan pelatihan kepada operator aplikasi SIMNANGKIS baik dari kecamatan maupun desa.

Hal ini dibenarkan oleh bapak Guribanto, S.IP selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Sedayu

“memang benar kami mendapatkan pelatihan aplikasi SIMNANGKIS dari TKPK Kabupaten. Pelatihan ini sudah ada sejak tahun 2015 dan membantu dalam program penanggulangan kemiskinan. Karena kami merupakan salah satu kecamatan prioritas dalam pengentasan kemiskinan aplikasi ini sangat membantu dalam hal saling belajar program penanggulangan kemiskinan antar kecamatan yang lain”.(Hasil wawancara tanggal 16 Maret 2017)

Hal senada juga dibenarkan oleh Ibu Wiji Harini, S.Sos., MM selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Kasihan

“Kami mendapatkan pelatihan sejak tahun 2015 dan hingga saat ini aplikasi SIMNANGKIS sangat membantu kerja TPK Kecamatan Kasihan. Seperti koordinasi dengan TKPK Kabupaten maupun dengan TPK lainnya sehingga kita bisa saling mengerti mengapa program di daerah lainnya lebih baik.(Hasil wawancara tanggal 20 Maret 2017)

Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS) merupakan aplikasi yang digunakan oleh TKPK sejak tahun 2014. Aplikasi SIMNANGKIS sendiri berisikan data kemiskinan dan progres penanggulangan kemiskinan. Keberadaan SIMNANGKIS diharapkan dapat menjadi entry point penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Desa. Dari TKPK sendiri telah memberikan pelatihan kepada anggota TPK Kecamatan maupun Desa. Setiap kecamatan dan desa akan ada operator yang menjalankan aplikasi SIMNANGKIS ini.

Jika dilihat dari tugas TKPK Kabupaten Bantul yaitu :

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

Maka pelatihan SIMNANGKIS sendiri sudah mendukung kedua tugas TKPK tersebut karena aplikasi ini telah mendukung percepatan entry data kemiskinan serta program-program yang dijalankan. Dari data yang masuk maka akan langsung bisa di cek oleh TKPK Kabupaten. Koordinasi juga bisa dilakukan oleh TKPK Kabupaten terhadap TPK Kecamatan maupun TPK Desa melalui aplikasi ini. Karena aplikasi akan menunjukkan data yang up date dari level Dusun sampai Kecamatan.

Dari data yang dikirim melauai aplikasi SIMNANGKIS TKPK Kabupaten bisa melihat sejauh mana progres yang dijalankan terkait penanggulangan kemiskinan. Apabila ada data yang tidak sesuai target atau data program yang belum terlaksana maka TKPK bisa langsung mengecek terhadap yang bersangkutan baik itu TPK Kecamatan maupun Desa. Terkait dengan pengendalian penanggulangan kemiskinan yang masuk ke dalam TKPK dari SKPD, TPK Kecamatan dan Desa akan termonitor melalui aplikasi SIMNANGKIS. Nantinya data warga miskin akan terdata by name by address. Dengan adanya data ini maka upaya pengendalian kemiskinan bisa tepat sasaran.

Seperti yang diutarakan oleh Ibu Eni (Kasubbid Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Bantul)

“Pelatihan aplikasi SIMNANGKIS telah mendukung tugas dari TKPK karena ada operator yang menjalankannya mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Aplikasi ini kan isinya data program penanggulangan kemiskinan seluruh Kabupaten Bantul. Maka dari itu program penanggulangan kemiskinan bisa dikendalikan”. (Hasil wawancara tanggal 20 November 2017)

Gambar 3.1
Aplikasi SIMNANGKIS Kabupaten Bantul



Sumber : TKPK Kabupaten Bantul

Dari gambar 3.1 tentang aplikasi SIMNANGKIS bahwa didalam aplikasi tersebut ada terdapat menu peta gakin atau keluarga miskin. Dalam menu tersebut terdapat data kemiskinan dari tingkat dusun hingga kabupaten. Nantinya setiap TPK Kecamatan dan Desa akan bisa saling melihat progres dari masing-masing program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan antar TPK Kecamatan maupun Desa. Sehingga aplikasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengirim data saja, namun bisa saling belajar program penanggulangan kemiskinan antar TPK Kecamatan dan Desa.

3.1.2 Motivasi Bekerja

Salah satu aspek yang menjadi potensi bagi pengembangan sumber daya manusia adalah motivasi kerja yang cenderung tinggi jelas merupakan potensi besar bagi sumber daya manusia yang ada untuk berkembang atas dasar kehendak, kemauan dan semangat internal. Pada dasarnya organisasi bukan hanya mengharapkan pegawai yang mampu, cakap dan terampil tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai tidak ada artinya bagi organisasi, jika mereka tidak mau bekerja keras dengan menggunakan kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang mereka miliki. Berkaitan dengan motivasi kerja dari para kader yang ada dapat memberi faktor lebih atau pendukung karena para kader yang ada di desa sangat antusias untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan.

Seperti yang diutarakan oleh Ibu Eni (Kasubbid Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Bantul)

“ salah satu faktor pendukung bagi kami TKPK adalah motivasi kerja dari para kader yang ada di desa yang sangat antusias untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan”.(Hasil wawancara tanggal 20 November 2017)

Apabila setiap organisasi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas tentang pekerjaannya maka ia memiliki potensi untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dengan kata lain bahwa semua hambatan yang mereka alami akan dapat dihadapi jika ada kemauan untuk bekerja. Bekal pendidikan adalah memberi kecakapan atau kepintaran. Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh TKPK

kepada kader yang ada di desa bertujuan untuk memberi kecakapan kepada masyarakat miskin agar mengerti program yang akan dijalankan. Sehingga motivasi kerja akan menjadikan organisasi akan berjalan dengan lancar.

Membentuk motivasi bekerja selain datang dari diri sendiri juga ada bentuk penghargaan yang diberikan bagi mereka yang berprestasi. Hal sudah dilakukan oleh TKPK Kabupaten Bantul untuk memotivasi kinerja dengan malakukan lomba. Seberapa jauh TPK Desa menurunkan angka kemiskinan dan menjalankan program dengan baik maka akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang didapat berupa dana tambahan untuk melakukan program tahun berikutnya. Cara yang dilakukan oleh TKPK ini sudah ada sejak tahun 2015.

Seperti yang diutarakan oleh Ibu Eni (Kasubbid Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Bantul)

” kita ada reward bagi TPK Desa yang bisa menjalankan program dengan baik dan menurunkan angka kemiskinan didaerahnya. Dengan begitu ada semangat kerja yang timbul di daerah dan wujud dari reward sendiri adalah uang”. (Hasil wawancara tanggal 20 November 2017)

Pemberian reward diberikan setelah dilakukan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Reward diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 20.000.000 yang ditujukan untuk tambahan anggaran penanggulangan kemiskinan. Ada tujuh desa yang mendapatkan rewarddari TKPK di tahun 2016, yaitu :

1. Desa Sumbermulyo
2. Desa Panjangrejo
3. Desa Srihardono

4. Desa Selopamioro
5. Desa Mangunan
6. Desa Terong
7. Desa Srimulyo

3.1.3 Kendala Pengembangan Sumber Daya Manusia

Diluar keberhasilan dari program yang bisa dijalankan oleh TKPK Kabupaten maupun TPK Desa masih ada kendala yang dialami di internal organisasi. Kendala yang dialami berada pada level TPK Desa yang masih bingung mengenai tugas yang akan mereka lakukan. Kebingungan yang dialami karena mereka belum punya inisiatif untuk melakukan program. Memang tidak semua TPK Desa mengalami kendala namun masih ada beberapa yang belum bisa melakukan program. Ada beberapa faktor yang dialami yaitu :

1. Pergantian personel anggota TPK desa. Pergantian personel sendiri dilakukan setiap tiga tahun sekali.
2. Pergantian pemimpin desa.
3. Belum menganggarkan yang ada hubungannya dengan pengentasan kemiskinan.

Untuk TPK Desa sendiri belum bisa dikatakan optimal karena masih ada beberapa desa yang belum melakukan program pengentasan kemiskinan. Meskipun ada Surat Keputusan dan Struktur Organisasinya tetapi tidak menjalankan program. Salah satu penyebabnya mereka tidak menganggarkan untuk melaksanakan program. Sehingga penguatan kelembagaan yang ada di tingkat desa tidak bisa kuat

sebagai mana semestinya. Tidak adanya landasan hukum untuk mengalokasikan dana TPK Desa menjadi penyebabnya.

Seperti yang diutarakan oleh Ibu Eni (Kasubbid Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Bantul)

“ bahwa tidak adanya landasan hukum untuk penganggaran TPK Desa menjadikan tidak semua Desa menyusun rancangan anggaran. Maka dari itu telah dibuat Peraturan Bupati Nomer 48 Tahun 2017 mengenai sinkronisasi anggaran dana desa yang mana salah satunya mengatur anggaran untuk TPK Desa. Namun aturan ini baru berlaku tahun 2018 sehingga selama tahun 2015-2016 bagi desa yang tidak mengalokasikan maka tidak menjalankan program dan itu menjadi salah satu kurangnya penguatan kelembagaan di tingkat desa”.(Hasil wawancara tanggal 12 Desember 2017)

Melihat pernyataan dari narasumber bahwa kendala dasar mengapa program tidak jalan di level desa adalah penganggaran yang tidak dianggarkan oleh pihak Pemerintahan Desa. Belum adanya aturan khusus yang mengatur juga menjadi penghambat masalah penganggaran. Meskipun ada Surat Keputusan dan Struktur Organisasi namun mereka tidak melakukan kegiatan program pengentasan kemiskinan.

Bahwa permasalahan yang ada berkaitan dengan anggaran. Salah satu permasalahannya yang sudah disebutkan oleh narasumber adalah tidak adanya penganggaran untuk program pengentasan kemiskinan. Ada desa yang belum berani menggunakan anggaran APBD Desa untuk digunakan dalam program pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2017 keluarlah Peraturan Bupati Nomer 48 Tahun 2017 mengenai sinkronisasi anggaran dana desa yang mana salah satunya mengatur anggaran untuk TPK Desa. Artinya mulai tahun 2018 semua Desa wajib

menganggarkan anggaran terkait TPK Desa dengan keadaan yang ada di internal TPK Desa.

Seperti yang diutarakan oleh Ibu Eni (Kasubbid Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Bantul)

“mulai tahun 2018 semua wajib menganggarkan terkait dengan program di TPK Desa meskipun dengan keadaan sumber daya manusia yang apa adanya”.(Hasil wawancara tanggal 20 Desember 2017)

3.2 Prosedur

3.2.1 Prosedur Penanganan Kemiskinan

Koordinasi merupakan suatu aspek dalam melakukan prosedur penanganan dalam suatu organisasi. Prosedur adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan. Koordinasi merupakan hal yang sangat vital bagi suatu organisasi dalam melakukan suatu tindakan. Berjalannya suatu tindakan atau prosedur ditentukan dari seberapa kuatnya koordinasi di dalam organisasi. TKPK Kabupaten Bantul merupakan lembaga yang dibentuk untuk melakukan koordinasi dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Dalam melakukan prosedur penanganan kemiskinan TKPK Kabupaten Bantul menggunakan tiga langkah dalam melakukan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Berikut adalah tiga langkah prosedur penanganan kemiskinan dari TKPK, tiga langkah tersebut diantaranya :

1. Koordinasi yang dilakukan bersama SKPD, TPK Kecamatan dan Desa.
2. Mensinkronisasikan berbagai program yang ada di setiap SKPD.

3. Melakukan evaluasi dari setiap program yang dijalankan.

Berikut penjelasan terkait dengan langkah-langkah prosedur penanganan kemiskinan di TKPK Kabupaten Bantul :

1. Koordinasi

Koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah upaya untuk memastikan bahwa program tersebut dijalankan secara terpadu dan berkesinambungan oleh seluruh sektor terkait dan pemangku kepentingan di dalamnya. Koordinasi ini penting karena ini menyangkut kerjasama antar sektor yang ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan di daerah. Koordinasi dalam konteks ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih antara program-program penanggulangan kemiskinan, baik dalam komponen (instrument) kegiatan, sasaran (penerima bantuan) dan alokasi anggaran.

Untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi tersebut TKPK Kabupaten Bantul memiliki prinsip utama dalam penanggulangan kemiskinan yang komprehensif. Prinsip komprehensif yang dimaksud adalah koordinasi yang dilakukan TKPK Kabupaten Bantul untuk menguatkan kelembagaan hingga ke level dusun. Untuk koordinasi sendiri dilakukan oleh TKPK Kabupaten Bantul bersama SKPD pada awal perencanaan program penanggulangan kemiskinan dan nantinya akan dievaluasi di akhir tahun. Sedangkan koordinasi yang dilakukan oleh TKPK Kabupaten Bantul dengan TPK Kecamatan maupun Desa dilakukan selama tiga kali dalam setahun. Koordinasi yang dilakukan TKPK ini merupakan sebuah wadah yang berfungsi untuk penajaman kebijakan dan

program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Tahapan koordinasi penanggulangan kemiskinan :

1. SKPD bersama TKPK melakukan koordinasi untuk menentukan program yang akan dijalankan.
2. TKPK Kabupaten akan melakukan koordinasi dengan TPK Kecamatan terkait dengan program yang sesuai dengan daerah di Kecamatan.
3. TPK Desa melakukan koordinasi dan menyiapkan fasilitas terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
4. TPK Pedukuhan melakukan pendataan keluarga miskin sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tabel 3.1
Pertemuan TKPK Kabupaten Bantul Dengan TPK Kecamatan Dan
Desa

No	Tanggal	Jam	Kecamatan	Tim
1	5 Februari 2015	09.00 WIB – selesai	Dlingo	1
		09.00 WIB – selesai	Pundong	2
2	6 Februari 2015	09.00 WIB – selesai	Piyungan	1
		09.00 WIB – selesai	Pajangan	2
3	7 Februari 2015	09.00 WIB – selesai	Jetis	1
		09.00 WIB – selesai	Sewon	2
4	25 Februari 2015	09.00 WIB – selesai	Banguntapan	1
		09.00 WIB – selesai	Srandakan	2
5	26 Februari 2015	09.00 WIB – selesai	Imogiri	1
		09.00 WIB – selesai	Bambanglipuro	2
6	27 Februari 2015	09.00 WIB – selesai	Pleret	1
		09.00 WIB – selesai	Pandak	2
7	28 Februari 2015	09.00 WIB – selesai	Bantul	1
		09.00 WIB – selesai	Kasih	2
8	3 Maret 2015	09.00 WIB – selesai	Kretek	1
		09.00 WIB – selesai	Sanden	2
9	5 Maret 2015	09.00 WIB – selesai	Sedayu	1

Sumber : TKPK Kabupaten Bantul

Dari tabel 3.1 menjelaskan bahwa ada pertemuan antara TKPK Kabupaten Bantul dengan TPK Kecamatan dan Desa bertempat di kantor kecamatan. Dari pertemuan yang dilakukan di setiap kecamatan nantinya akan menjelaskan program apa saja yang akan dilaksanakan di daerah tersebut. Dalam pertemuan tersebut TKPK Kabupaten Bantul membagi dua tim yaitu tim 1 dan 2 karena dalam satu hari ada dua pertemuan. Selain menjelaskan program, dalam pertemuan tersebut juga memberikan pelatihan aplikasi SIMNANGKIS. Nantinya diharapkan dari pertemuan tersebut TKPK Kabupaten bisa bertukar pendapat dengan kecamatan maupun desa.

Dari keempat tahapan yang sudah dijelaskan di atas setiap lembaga mempunyai peran masing-masing dalam prosedur penanganan kemiskinan, diantaranya :

1. SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul

Pada tahapan pertama tadi terkait dengan koordinasi peran dari SKPD adalah memberikan masukan terkait program penanggulangan kemiskinan. Program yang ada di SKPD akan di pilih berdasarkan rapat koordinasi dengan TKPK Kabupaten. Yang menjalankan program tetaplah SKPD terkait dengan tetap melakukan koordinasi dengan TKPK Kabupaten. Nantinya SKPD yang akan turun ke lapangan untuk memberikan arahan terkait dengan program.

Untuk menentukan program yang utama, kedua dan kondisional dilakukan berdasarkan jumlah warga miskin di daerah tersebut. Apabila

daerah tersebut mempunyai angka kemiskinan yang tinggi maka akan dilakukan dengan membuat program utama. Untuk program yang sifatnya kedua ditentukan juga dengan angka kemiskinan, namun angka kemiskinan yang masih dibawah dari program utama. Kondisional yang dimaksud berdasarkan situasinya dan apabila ditemukan program yang tidak jalan setelah di monitor maka akan diganti.

Seperti yang diutarakan oleh Ibu Eni (Kasubbid Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Bantul)

“saat kita akan membuat program kita undang SKPD untuk menentukan program apa saja yang utama, kedua dan kondisioanl berdasarkan situasinya. Setelah ditentukan mana saja programnya maka SKPD yang akan terjun ke lapangan“. (Hasil wawancara tanggal 6 November 2017)

Gambar 3.2

Rapat Koordinasi Antara SKPD Dengan TKPK Kabupaten Bantul



Sumber : Dokumen TKPK Tahun 2016

2. TKPK Kabupaten Bantul

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TKPK, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Peran dari TKPK sendiri adalah melakukan koordinasi antar SKPD dan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kecamatan, Desa dan Dusun guna menyusun langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Lebih lanjut prosedur kerja dari TKPK Kabupaten ada di pasal 10 Permendagri Nomer 42 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- b. Pengendalian pemantauan dan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan dan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik.
- d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan.
- f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati atau Walikota dan TKPK Provinsi.

Gambar 3.3

Peran Kelembagaan TKPK



Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

3. TPK Kecamatan

Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan berkedudukan di tingkat Kecamatan dibawah koordinasi TKPK Kabupaten. TPK Kecamatan mempunyai peran dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat kecamatan. TPK Kecamatan juga sebagai koordinator TPK Desa.

Di dalam melakukan prosedur kinerja penanggulangan kemiskinan TPK Kecamatan dibantu oleh beberapa unsur-unsur, diantaranya :

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain forum Badan Koordinasi Masyarakat (BKM), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, penggerak PKK dan lain-lain.
- b. Lembaga Pendidikan antara lain Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Pendidikan Keterampilan.
- c. Dunia usaha antara lain pabrik, distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan atau ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, penyedia jasa konstruksi dan lain-lain.
- d. Unit kerja SKPD di wilayah Kecamatan antar lain Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan, Kantor Urusan Agama, Petugas Penyuluh Lapangan, Puskesmas, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dasar.

Dalam prosedur penanganan kemiskinan di tingkat Kecamatan dilakukan dengan melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan. Adapun poin-poinnya meliputi :

- a. Melakukan pendataan potensi sumber daya baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi, usaha, keterampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya.
- b. Menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan.
- c. Melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan kepada semua pemangku kepentingan (stake holders) di wilayah kerjanya.
- d. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak yang memiliki sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan.
- e. Memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya.
- f. Menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Kabupaten setiap bulan November.
- g. Menyampaikan laporan tentang kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan laporan tentang perolehan sumbangan baik berupa barang, dana, atau fasilitas lain dari pelaku penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap bulan Mei dan bulan November.

4. TPK Desa

Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat Desa. TPK Desa secara operasional berada dibawah koordinasi TPK Kecamatan. Fungsi dari TPK Desa melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Desa. Dalam melakukan prosedur kerja TPK Desa juga dibantu oleh LSM, lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat.

Untuk melakukan prosedur penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu :

1. Mengelola dan memutakhirkan (up dating) data keluarga miskin. Sebagaimana yang dimaksud mengelola dan memutakhirkan (up dating) data keluarga miskin, meliputi :
 - a. Melaksanakan pendataan keluarga miskin pada tingkat desa.
 - b. Mendorong dan mengkoordinasi pelaksanaan dan pemutakhiran (up dating) data dan profil keluarga miskin yang dilakukan TPK Pedukuhan.
 - c. Mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga miskin dari TPK Pedukuhan.
 - d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktepatan data keluarga miskin, dan melakukan verifikasi terhadap aduan tersebut.
 - e. Menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat desa.
 - f. Menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada TPK Kecamatan secara periodik setiap April dan Oktober.

Tabel 3.2

Contoh Pemutakhiran Data Keluarga Miskin Di Tingkat Desa

No	Pedukuhan	Pekerjaan KK Miskin	Jumlah (Orang)
1		(contoh) buruh serabutan	16
		(contoh) tukang kayu	5
		Dst	
2		(contoh) pemulung	18
		(contoh) buruh gendhong	9
		Dst	
3			
Dst			

Sumber : TKPK Kabupaten Bantul

2. Melakukan fasilitas dan koordinasi kegiatan. Sebagaimana yang dimaksud melakukan fasilitas dan koordinasi kegiatan meliputi :
 - a. Melakukan pendataan potensi sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana-prasarana, teknologi, usaha, keterampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di desanya.
 - b. Menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana tersebut pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan.
 - c. Menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desanya.
 - d. Menentukan calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan proritas dan urgensi masalah.
 - e. Berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa.

- f. Mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan atau lembaga masyarakat di desanya dalam penanggulangan kemiskinan.
 - g. Memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desanya.
 - h. Menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan setiap bulan Oktober.
 - i. Menyampaikan laporan tentang daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan, daftar kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, perolehan sumbangan antara lain berupa barang, dana atau fasilitas lainnya dari pelaku penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap April dan Oktober.
3. Melakukan pendampingan, mekanisme pendampingan dengan cara :
- a. Mendorong dan mengkoordinasi TPK Pedukuhan untuk mengumpulkan data tentang keterampilan, minat, potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerja masing-masing.
 - b. Mengumpulkan dan mengolah laporan TPK pedukuhan tentang keterampilan atau minat atau potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerja dan mengelola data tersebut.
 - c. Menyusun serta mengelola data tentang keterampilan, minat dan potensi yang dimiliki keluarga miskin di desa yang bersangkutan.

- d. Mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping tingkat desa maupun pedukuhan.
 - e. Memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan pendampingan dan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di desanya.
 - f. Membangun sinergi dengan semua lembaga terkait, termasuk badan atau lembaga keswadayaan masyarakat di desanya.
 - g. Membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan.
 - h. Menyampaikan laporan tentang daftar keterampilan atau minat atau potensi yang dimiliki keluarga miskin setiap bulan Oktober.
 - i. Menyampaikan laporan tentang daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap April dan Oktober.
5. TPK Pedukuhan

Tim Penanggulangan Kemiskinan Pedukuhan bertugas melakukan pendataan, pendampingan dan pemantauan perkembangan kesejahteraan warga miskin di tingkat pedukuhan. Untuk prosedur kerja dari TPK Pedukuhan dibantu oleh LSM, organisasi kepemudaan, PKK, kelompok usaha dan lembaga pendidikan keterampilan. TPK Pedukuhan secara operasional dibawah koordinasi TPK Desa.

Untuk melakukan prosedur penanggulangan kemiskinan di pedukuhan dilakukan dengan dua tahapan, diantaranya :

1. Mengelola data dan profil keluarga miskin dengan mekanisme :

- a. Melaksanakan pendataan, pemutakhiran dan verifikasi data keluarga miskin, sesuai ketentuan pemerintah Kabupaten Bantul.
 - b. Menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat pedukuhan.
 - c. Menerima dan menindak lanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidak tepatan data keluarga miskin, dan melakukan verifikasi terhadap aduan tersebut.
 - d. Melakukan pendataan potensi sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana-prasarana, teknologi, usaha, keterampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di pedukuhan.
 - e. Mengumpulkan dan mengolah data tentang keterampilan atau minat atau potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerja masing masing.
 - f. Mendorong warga miskin di pedukuhan untuk memiliki kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran.
 - g. Menyampaikan laporan tentang daftar potensi sumber daya penanggulangan kemiskinan, dan daftar keterampilan atau minat atau potensi yang dimiliki keluarga miskin, setiap bulan September.
 - h. Menyampaikan laporan tentang perkembangan profil keluarga miskin di pedukuhan kepada TPK Desa secara periodik setiap Maret dan September.
2. Melakukan pendampingan dengan mekanisme :
 - a. Menyusun rencana pemanfaatan potensi sumber daya penanggulangan kemiskinan.

- b. Menyusun daftar prioritas calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah.
- c. Mengorganisasi serta memantau perkembangan dan keberlanjutan pelaksanaan pendampingan kegiatan di pedukuhan.
- d. Membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa.
- f. Mendorong keterlibatan individu, kelompok, atau lembaga masyarakat di pedukuhan dalam penanggulangan kemiskinan.
- g. Memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di pedukuhannya.
- h. Menyampaikan laporan tentang potensi sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan setiap bulan September.
- i. Menyampaikan laporan tentang daftar pendampingan kegiatan daftar perolehan sumbangan baik berupa barang, dana, atau fasilitas lain dan daftar kegiatan swadaya masyarakat secara periodik setiap bulan Maret dan bulan September.

2. Sinkronisasi Program

Untuk mengsinkronkan program antar SKPD dari TKPK setiap awal tahun SKPD akan di undang ke BAPPEDA untuk membahas terkait program apa saja

yang akan digunakan. Setiap SKPD ada roadmap penanggulangan kemiskinan, dari roadmap tersebut akan dibahas antar SKPD mana saja yang akan menjadi prioritas program penanggulangan kemiskinan. Untuk memperkuat sinkronisasi program antar SKPD maka TKPK Kabupaten Bantul merekomendasikan agar SKPD mengacu pada analisa :

- a. Analisis terhadap peta konsolidasi program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Agar program penanggulangan kemiskinan dapat terkonsolidasi TKPK Kabupaten Bantul telah membuat ruang lingkup penanggulangan kemiskinan yang nantinya dapat di jadikan acuan bagi SKPD terakait.

Ada tiga ruang lingkup yang digunakan, diantaranya :

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, dilakukan dengan memberikan bantuan sandang pangan, kesehatan dan pendidikan.
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan berbagai pelatihan diantaranya memberikan pelatihan dunia usaha, memberikan fasilitas kepada relawan yang membantu program penanggulangan kemiskinan. Memberikan fasilitas kepada UMKM di Kabupaten Bantul.
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dengan cara memberikan modal bagi pelaku usaha serta meningkatkan sarana prasarana bagi UMKM.

- b. Analisa tentang anggaran (belanja) untuk penanggulangan kemiskinan daerah.

Tabel 3.3
Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran Daerah	Program Pendukung	Anggaran (rupiah)
Turunnya masyarakat kurang mampu	Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	3.977.145.000
	Meningkatkan kesempatan bekerja	156.468.500
	Program pemberdayaan fakir miskin dan PMKS	1.406.799.000
	Program pengembangan UMKM	450.000.000
	Program wajib belajar 9 tahun	150.000.000
Jumlah		6.140.412.509

Sumber : RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2016

Jumlah anggaran yang mencapai 6 milyar diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap program penanggulangan kemiskinan. Jumlah anggaran yang mengalami kenaikan dari 5 milyar menjadi 6 milyar diharapkan menjadi pemompa semangat dari SKPD terkait dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Tentunya dengan anggaran yang

besar harus berbading lurus dengan kondisi masyarakat miskin yang semakin baik

c. Analisis terhadap proritas penanggulangan kemiskinan.

Ada enam prioritas dalam penanggulangan kemiskinan yang di keluarkan oleh TKPK Kabupaten Bantul, diantaranya :

1. Pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin.
2. Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.
3. Pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat Sekolah Menengah.
4. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di desa diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat.
5. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni.
6. Peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum.

3. Evaluasi Program

Evaluasi program dilakukan oleh TKPK Kabupaten Bantul saat akhir tahun. Untuk melakukan evaluasi program, TKPK Kabupaten Bantul menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada penerima bantuan, adapun pertanyaan yang diberikan kepada penerima bantuan diantaranya :
 - a. Apakah sosialisasi pemanfaatan bantuan keuangan mudah dipahami ?
 - b. Apakah waktu pelaksanaan sosialisasi bantuan keuangan sudah tepat ?

- c. Apakah jumlah bantuan keuangancukup ?
- d. Apakah bantuan keuangan khusus bermanfaat bagi peningkatan pendapatan saudara ?
- e. Apakah pendamping membantu saudara dalam memahami sosialisasi ?
- f. Apakah keberadaan pendamping bermanfaat bagi saudara ?

2. Penilaian Dengan Skala Likert

Scoring

- Sangat Setuju : 5
- Setuju : 4
- Netral : 3
- Tidak Setuju : 2
- Sangat Tidak Setuju : 1

Ranking

- 0-20% : Sangat Buruk
- 21-40% : Buruk
- 41-60% : Netral
- 61-80% : Baik
- 81-100% : Sangat Baik

3. Ranking

Ranking yang dimaksud adalah penilaian dari penerima bantuan yang telah mengisi kuesioner dari TKPK Kabupaten Bantul. Dalam menentukan ranking tersebut ada enam penilaian, diantaranya :

- a. Sosialisasi pemanfaatan.

- b. Waktu pelaksanaan.
- c. Jumlah bantuan.
- d. Manfaat peningkatan.
- e. Pendampingan (membantu).
- f. Pendamping (bermanfaat).

4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari evaluasi yang dilakukan oleh TKPK Kabupaten Bantul terhadap program yang sudah dijalankan. Dari kesimpulan ini maka dapat diketahui identifikasi masalah yang berguna dalam pembentukan program di kemudian hari. Sehingga diharapkan program berikutnya akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.4

Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

No	Indikator	Tingkat Kepuasan Masyarakat (%)
1	Pendamping bermanfaat	74,29
2	Pendampingan membantu	62,86
3	Manfaat pelaksanaan	70,00
4	Waktu pelaksanaan	67,50
5	Jumlah bantuan	40,00
6	Sosialisasi pemanfaatan	78,75

Sumber : TKPK Kabupaten Bantul Tahun 2016

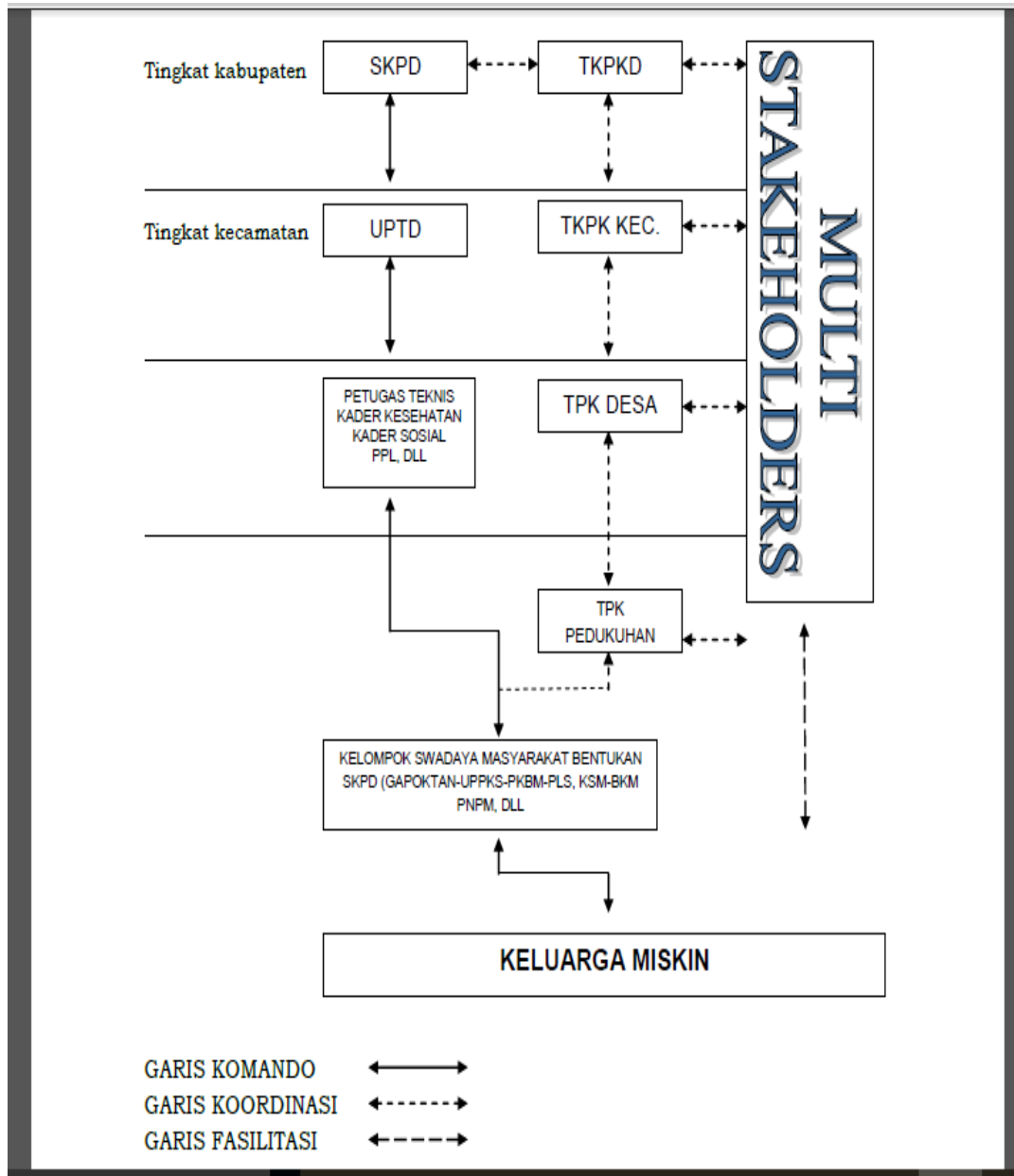
Dari evaluasi yang dilakukan TKPK Kabupaten Bantul bahwa angka kepuasan tertinggi ada dalam sosialisasi pemanfaatan yang mencapai 78,75 %.

Angka tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan dapat diterima dengan baik. Sedangkan angka terendah ada dalam jumlah bantuan yang hanya mencapai 40 %. Angka tersebut merepresentasikan bahwa masih banyak penerima bantuan yang masih belum cukup terhadap apa yang mereka terima.

3.2.2 Analisa Prosedur Penanganan Kemiskinan TKPK Kabupaten Bantul

Gambar 3.4

Koordinasi Penanganan Kemiskinan



Sumber : Petunjuk Teknis Operasioanl TKPK Kabupaten Bantul

Secara keseluruhan prosedur yang dijalankan sudah berjalan dengan baik. Mulai dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Dusun. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendampingan dari TKPK Kabupaten kepada TPK Desa, yang mana setiap TPK Desa akan didampingi satu pendamping dari TKPK Kabupaten. Tugas dari pendamping ini adalah memberi pengarahan terhadap kader di Desa yang akan menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Selain ada pendampingan juga ada rapat dan koordinasi ke tingkat Desa. Dari gambar 3.4 tentang koordinasi penanganan kemiskinan jelas alur terkait koordinasi penanganan kemiskinan. Pada tahapan prosedur penanganan kemiskinan sudah ada siapa saja yang diberi komando dan alur koordinasinya, siapa yang memfasilitasinya. Sehingga dengan demikian akan jelas prosedur penanganan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Untuk setiap akhir tahun nantinya akan ada evaluasi yang dilakukan oleh TKPK terhadap kinerja program dari SKPD maupun TPK Kecamatan dan Desa. Evaluasi yang dilakukan oleh TKPK tidak hanya melihat sebuah data saja melainkan langsung datang kepada yang menerima bantuan. Sehingga bisa dilihat bagaimana program itu berjalan sebagai mana mestinya. Sinkronisasi program juga bisa dikatakan baik karena sejak awal ada koordinasi dari TKPK Kabupaten dengan SKPD. Selain itu dengan adanya monitor setiap triwulan bisa dilihat prosedur yang dilakukan sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Seperti yang diutarakan Ibu Eni (Kasubbid Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Bantul)

“ prosedur secara keseluruhan sudah baik karena ada koordinasi dan kita rapatkan. Setiap tahun minimal kita tiga kali ke Desa untuk koordinasi dan memonitor program yang ada. Dari hasil koordinasi tersebut akan ditentukan program mana saja yang diutamakan. Sehingga muncul sinkronisasi antar program “. (Hasil wawancara tanggal 12 Desember 2017)

3.3 Sistem

3.3.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan proses yang dilakukan sebuah organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai sebuah strategi. Rencana staregis yang dilakukan oleh TKPK Kabupaten Bantul merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Berikut rencana strategi penanggulangan kemiskinan dari TKPK Kabupaten Bantul :

1. Mengurangi Beban Pengeluaran Warga Miskin

Dalam rangka mengurangi beban pengeluaran warga msikin TKPK membuat program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dalam waktu jangka pendek bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin dan dalam waktu jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. PKH merupakan perlindungan sosial

yang memberikan perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI).

Teknis pelaksanaan program ini didasarkan pada tiga hal :

1. Verifikasi, yang merupakan esensi utama dari PKH. Kegiatan verifikasi mengecek kepatuhan peserta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
2. PKH melaksanakan pemotongan bantuan tunai bagi keluarga yang tidak mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Peserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat menerima bantuan tunai. Peserta adalah elemen penting dalam program ini. Pengetahuan atas kewajiban ini yang menjadi dasar perubahan perilaku keluarga dan anggota keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Peserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat menerima bantuan tunai. Peserta adalah elemen penting dalam program ini. Pengetahuan atas kewajiban ini yang menjadi dasar perubahan perilaku keluarga dan anggota keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan PKH tahun 2016 di Kabupaten Bantul menyangar 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Jumlah Keluarga Sangat Miskin yang menjadi peserta PKH sebesar 33.074 orang.

Tabel 3.5

**Lokasi dan Jumlah Keluarga Sangat Miskin di Kabupaten Bantul
Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Pendamping	Calon KSM	KSM Lama	Jumlah KSM
1	BAMBANG LIPURO	6	1.214	1.063	2.277
2	BANGUNTAPAN	9	1.244	1.189	2.433
3	BANTUL	6	1.009	716	1.725
4	DLINGO	7	1.700	80	1.780
5	IMOGIRI	8	2.315	136	2.451
6	JETIS	7	1.268	933	2.201
7	KASIHAN	7	1.750	135	1.885
8	KRETEK	4	665	459	1.124
9	PAJANGAN	10	961	1.594	2.555
10	PANDAK	10	1.277	1.805	3.082
11	PIYUNGAN	7	1.060	1.025	2.085
12	PLERET	7	1.164	997	2.161
13	PUNDONG	6	862	858	1.720
14	SANDEN	4	1.039	116	1.155
15	SEDAYU	4		1.066	1.066
16	SEWON	8	2.005	114	2.119
17	SRANDAKAN	5	624	631	1.255
TOTAL		115	20.157	12.917	33.074

Sumber : UPPKH Kabupaten Bantul Tahun 2016

Hak peserta Program Keluarga Harapan adalah :

1. Menerima bantuan uang tunai.

2. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes.
3. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Tabel 3.6

Komponen PKH Kabupaten Bantul Tahun 2015-2016

Tahun 2015	Jumlah Bantuan Per Tahun	Tahun 2016	Jumlah Bantuan Per Tahun
Bantuan tetap	Rp. 500.000	Bantuan tetap	Rp. 500.000
Komponen kesehatan : Ibu menyusui atau hamil, Balita	Rp. 1.200.000	Komponen kesehatan : Ibu menyusui atau hamil, Balita	Rp. 1.200.000
Komponen pendidikan :		Komponen pendidikan :	
1. SD	Rp. 450.000	1. SD	Rp. 450.000
2. SMP	Rp. 750.000	2. SMP	Rp. 750.000
Penyaluran	Tunai	Penyaluran	Non tunai

Sumber : TKPK Kabupaten Bantul

Tabel 3.7
Data Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bantul
Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bantul	244 KK
2	Pajangan	158 KK
3	Pandak	441 KK
4	Srandakan	226 KK
5	Sanden	153 KK
6	Bambanglipuro	277 KK
7	Pundong	248 KK
8	Kretek	51 KK
9	Jetis	154 KK
10	Imogiri	169 KK
11	Pleret	102 KK
12	Dlingo Pleret	144 KK
13	Sewon	150 KK
14	Kasih	178 KK
15	Sedayu	142 KK
16	Banguntapan	354 KK
17	Piyungan	154 KK
Jumlah		3.245 KK

Sumber : TKPK Kabupaten Bantul

Tahapan penyaluran dengan dua tahapan yaitu :

1. Bantuan tetap diberikan satu kali dalam satu tahun.
2. Bantuan komponen diberikan dalam empat tahap penyaluran.

Meski Program Keluarga Harapan termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Kepesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun selama mereka masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi persyaratan yang mengikat maka mereka harus keluar secara alamiah (*Natural Exit*). Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan Resertifikasi. Resertifikasi adalah kegiatan pendataan ulang yang dilakukan pada tahun kelima kepesertaan rumah tangga dengan menggunakan metoda tertentu.

Metode yang digunakan dalam resertifikasi meliputi :

- a. Dilakukan pelaksanaan Resertifikasi pada tahun kelima (5) kepesertaan PKH dengan melihat kondisi sosial ekonomi serta syarat kepesertaan rumah tangga PKH.
- b. Rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan akan keluar dari program (Lulus), sementara itu untuk mereka yang masih memenuhi persyaratan akan menerima tambahan program selama tiga tahun (Transisi).
- c. Rumah Tangga Transisi diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan memperoleh pengetahuan mengenai ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

- d. Rumah Tangga yang Lulus (Graduasi) direkomendasikan untuk menerima program perlindungan sosial lainnya.
2. Meningkatkan Kemampuan Dan Pendapatan Warga Miskin

Untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin dilakukan dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE merupakan kelompok yang dibentuk oleh warga yang telah dibina melalui proses kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan.

Tujuan dari KUBE antara lain untuk :

1. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama.
2. Peningkatan pendapatan.
3. Pengembangan usaha.
4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dengan masyarakat sekitar.

Untuk menumbuhkan program melalui KUBE maka diperlukan strategi yang meliputi :

- a. Kepengurusan KUBE, pada hakikatnya KUBE dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok. Pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki

kualitas seperti kesediaan mengabdikan, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya.

- b. Keanggotaan KUBE, anggota KUBE adalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sebagai sasaran program yang telah disiapkan. Jumlah anggota untuk setiap KUBE berkisar antara 5 sampai 10 orang per KK sesuai dengan jenis PMKS. Khusus untuk Pembinaan Masyarakat Terasing dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, pembentukan KUBE berdasarkan unit pemukiman sosial, artinya suatu unit pemukiman sosial adalah satu KUBE.
- c. Administrasi KUBE, untuk dapat berjalan dan berkembangnya KUBE dengan baik, maka pengurus maupun pengelola KUBE perlu memiliki catatan atau administrasi yang baik, yang mengatur keanggotaan, organisasi, kegiatan keuangan, pembukuan dan lain sebagainya. Catatan dan administrasi KUBE meliputi antara lain buku anggota, buku peraturan KUBE, pembukuan keuangan atau pengelolaan hasil, daftar pengurus dan sebagainya.
- d. Pelatihan keterampilan berusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan keterampilan PMKS serta kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan pengembangan bisnis usahanya. Nilai tambah lain dari pelatihan adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan harga diri PMKS untuk

mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memperbaiki kondisi kehidupannya.

- e. Pemberian bantuan stimulan, pemberian bantuan dimaksudkan sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan keterampilan PMKS dan kondisi setempat. Bantuan ini merupakan hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi diharapkan bagi PMKS penerima bantuan untuk mengembangkan dan menggulirkan kepada warga masyarakat lain yang perlu dibantu. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 7.500.000 setiap kelompok. Bantuan diberikan dari awal tahun setelah syarat seperti kepengurusan, administrasi dan keanggotaan telah dibentuk.

Selain lima strategi diatas diperlukan juga pembinaan dan monitoring dan evaluasi dalam berjalannya Kelompok Usaha Bersama. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping meningkatkan motivasi dan kemampuan pelaksanaan dilapangan serta kapasitas manajemen pengelola KUBE. Pembinaan dilaksanakan oleh petugas sosial wilayah mulai dan tingkat propinsi, kabupaten atau kodya, kecamatan dan desa atau kelurahan secara berjenjang. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana.

Tabel 3.8**Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE Tahun 2016**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Kelompok
1	Sanden	Gadingsari	10
2	Srandakan	Trimurti	20
3	Kretek	Trimulyo	10
4	Bambanglipuro	Mulyodadi	15
5	Bantul	Palbapang	15
6	Pajangan	Guwosari	10
7	Sewon	Bangunharjo	15
8	Dlingo	Terong	10
		Dlingo	10
9	Sedayu	Argodadi	10
		Argorejo	10

Sumber : TKPK Kabupaten Bantul

3. Mengembangkan Dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro Dan Kecil

Kebijakan, program, maupun kegiatan terhadap penanggulangan dan pengentasan kemiskinan merupakan agenda pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk meminimalisir warga masyarakatnya yang masih berada di bawah garis kemiskinan untuk ditingkatkan pada level lebih sejahtera. Kebijakan ini diarahkan pada pembangunan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Bantul diarahkan pada pengembangan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UKM.

Adapun sasarannya adalah peningkatan kinerja dan produktifitas usaha koperasi dan UKM.

Untuk mendukung program usaha kecil menengah agar terus berkembang maka pemerintah Kabupaten Bantul melakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan merupakan bagian dari upaya mengembangkan semangat kewirausahaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tiga sub kegiatan dengan tema yang berbeda, yaitu kelompok masyarakat, kewirausahaan dan One Village One Product (OVOP). Kelompok masyarakat dilaksanakan sebanyak 28 kali dengan sasaran 560 orang dan masing-masing kelompok sebanyak 20 orang yang dilaksanakan di Kecamatan Sedayu, Banguntapan, Piyungan, Kasihan, Pandak, Bantul, Imogiri, Pundong, Sewon, Bambanglipuro, Pleret dan Kretek.

Kewirausahaan dilaksanakan sebanyak empat kali dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang, yang berlokasi di Banguntapan, Pleret, Sanden dan Srandakan. Sementara OVOP dilaksanakan dengan empat jenis pelatihan yaitu *Achievement Motivation Training* (AMT), pelatihan koperasi, Sertifikasi Perizinan Industri

Rumah Tangga (S-PIRT), dan pelatihan manajemen dengan jumlah kelompok binaan 11 kelompok, dengan nama kelompok Batik Musa, Sejahtera, Mas Panji, Karya Persada, Ngudi Koyo, Andayani, Mekar Sari, Geseuberm Al Basith, TKPK Pandeyan dan Ngudi Barokah. Melalui kegiatan ini diharapkan akan muncul dan membantu usaha wirausahawan potensial di Kabupaten Bantul.

2. Penyelenggaraan Industri Rumah Tangga dan UKM

Kegiatan ini diperuntukkan bagi pengusaha dibidang makanan dan minuman. Kegiatan ini diikuti oleh 60 UKM bidang makanan dan minuman. Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah pelaku UKM yang telah mengikuti pembinaan dan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan memperoleh sertifikat P-IRT, sehingga produk yang diolahnya benar-benar memenuhi standar kesehatan dan semakin laku di pasaran.

4. Mensinergikan Kebijakan Dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Untuk mensinergikan program dari beberapa SKPD Kabupaten Bantul dari awal sudah dilakukan koordinasi sebelum ditentukan program apa saja yang akan dipakai. Dalam koordinasi setiap SKPD akan diberi panduan mengenai data yang ada dalam aplikasi Basis Data Terpadu (BDT). Aplikasi BDT dapat menjadi acuan SKPD dalam menentukan program. Karena di dalam aplikasi BDT mencakup permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya. Setelah SKPD menganalisa data dari aplikasi BDT maka akan

dibahas terkait dengan program pengentasan kemiskinan. Agar program dan kebijakan dapat bersinergi maka kebijakan dan program dari Pemerintah Daerah dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat.

3.3.2 Visi Misi

Visi misi merupakan suatu statemen yang berisikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Visi misi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam tujuan untuk mencapai target. Untuk visi misi dari TKPK merupakan penjabaran dari visi misi RPJMD tahun 2016-2021 Kabupaten Bantul. Nantinya dari visi misi RPJMD tersebut akan dijabarkan dalam arah kebijakan serta capaian kinerja di tahun 2016.

Visi dari TKPK Kabupaten Bantul mengikuti RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 yaitu :

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Misi

Misi dari dari TKPK Kabupaten Bantul diambil berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021 yaitu :

1. Meningkatkan **tata kelola pemerintahan** yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan **kualitas sumber daya manusia** yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan **kesejahteraan masyarakat** difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan **kapasitas dan kualitas sarana-prasarana** umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan **tata kehidupan masyarakat Bantul** yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Jika dilihat dari misi TKPK Kabupaten Bantul maka dari diambil poin ke tiga dari misi RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 yaitu :

“mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran,

penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program untuk mewujudkan visi-misi. Sementara kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut pemerintah Kabupaten Bantul sudah merumuskan arah strategi dan kebijakan untuk mewujudkan visi misi dari TKPK Kabupaten Bantul.

Strategi dan arah kebijakan dari visi misi TKPK Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Table 3.9**Strategi Dan Arah Kebijakan TKPK Kabupaten Bantul Tahun 2016**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Outcome	Capaian Kinerja
1. Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	1. Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha	Angka pengangguran	27.182 Jiwa
	2. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu	1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Jumlah anggota keluarga sejahtera	186.400 Keluarga
	3. Validasi masyarakat miskin	1. Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat	Angka penyandang masalah kesejahteraan sosial	137.927 Jiwa

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Dari capaian kinerja dari tahun 2015 ke 2016 terkait angka pengangguran mengalami kenaikan yang mana pada tahun 2015 sebesar 13.404 jiwa menjadi 27.188 jiwa ditahun 2016. Hal ini berkaitan dengan kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Selain itu PHK juga menjadi penyebab pengangguran meningkat. Untuk anggota keluarga sejahtera capaian dari tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan yang semula 207.279 keluarga turun menjadi 186.400 keluarga. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa

faktor, mulai dari daya beli masyarakat yang menurun karena harga kebutuhan pokok yang terus naik, ditambah lagi pendapatan petani dan buruh rata-rata pendapatan hanya mencapai Rp. 39.800 per hari.

Untuk capaian kinerja penyandang masalah kesejahteraan sosial di tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan dari 138.791 jiwa di tahun 2015 turun menjadi 137.927 di tahun 2016. Dari penurunan tersebut maka bisa dikatakan menunjukkan angka keberhasilan. Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dari menurunnya angka masalah kesejahteraan sosial, diantaranya membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah dasar sampai tingkat atas, mengembangkan sistem bantuan sosial yang mana keaktifan masyarakat ditingkatkan agar tepat sasaran.